

**FRAMING MEDIA DALAM PEMBERITAAN CALEG MANTAN
NARAPIDANA KORUPSI DI PEMILU 2024 (STUDI KASUS DI
KOMPAS.COM DAN MEDIA INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar sarjana Ilmu Politik (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik



Aura Sukma Aulia

10020120033

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Juni, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aura Sukma Aulia

NIM : 10020120033

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Framing Media dalam Pemberitaan Caleg Mantan Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 (Studi Kasus di Kompas.com dan Media Indonesia)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun,
2. Skripsi ini adalah benar – benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atau karya orang lain,
3. Apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 20 Juni 2024
Yang Menyatakan



Aura Sukma Aulia
NIM 10020120033

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aura Sukma Aulia

NIM : 10020120033

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul *Framing Media dalam pemberitaan caleg mantan narapidana korupsi di Pemilu 2024 (Studi Kasus di Kompas.com dan Media Indonesia)*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 4 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Ajeng Widya Prakasita, M.A.

NIP 19950223202012205

PENGESAHAN

Skripsi oleh Aura Sukma Aulia dengan judul *Framing Media dalam pemberitaan caleg mantan narapidana korupsi di Pemilu 2024 (Studi Kasus di Kompas.com dan Media Indonesia)* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Juni 2024.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP 19950223202012205

Penguji II



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP 196909071994032001

Penguji III



Noor Rohman, M.A.
NIP 198510192015031001

Penguji IV



Dr. H. Moh Illyas R., M.Si.
NIP 197704182011011007

Surabaya, 20 Juni 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aura Sukma Aulia
NIM : 10020120033
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
E-mail address : aurasukma0410@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FRAMING MEDIA DALAM PEMBERITAAN CALEG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI

P

EMILU 2024 (STUDI KASUS DI 'KOMPAS.COM' DAN MEDIA INDONESIA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Selasa 17 September 2024

Penulis



(Aura Sukma Aulia)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Aura Sukma Aulia: “Framing Media dalam Pemberitaan Caleg Mantan Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 (Studi Kasus di Kompas.com dan Media Indonesia).”

Riset ini memiliki tujuan menganalisis framing media tentang caleg mantan narapidana korupsi pada pemilu 2024 di kompas.com dan media indonesia, serta menganalisis bagaimana respon yang dipaparkan pada pemberitaan caleg mantan narapidana korupsi pada pemilu 2024 di Kompas.com dan Media Indonesia.

Landasan teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian yaitu teori yang dikemukakan oleh Robert N. Entman mengenai analisis framing. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dibagi menjadi dua data yaitu data primer yang bersumber dari pemberitaan media Kompas.com dan Media Indonesia pada pemberitaan yang diteliti peneliti serta wawancara guna mengkonfirmasi pemberitaan. Selanjutnya teknik pengumpulan data sekunder dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan PKPU No 10 dan 11 Tahun 2023, serta data dari sumber tertulis.

Penelitian tentang framing media dalam pemberitaan caleg mantan narapidana korupsi pada pemilu 2024 menurut teori Robert N. Entman menunjukkan bahwa, pemberitaan ini dipandang sebagai permasalahan hukum dan politik, terutama terkait dengan status mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Diagnosis penyebab masalah adalah status mereka sebagai mantan narapidana korupsi yang ingin terlibat dalam pemilu 2024, yang bertentangan dengan peraturan PKPU No 10 dan 11 Tahun 2023 serta UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Untuk membuat keputusan moral, penekanan diberikan pada perlunya KPU mengambil tindakan tegas dan mematuhi putusan MA yang mengikat. Rekomendasi penanganan masalah adalah KPU seharusnya memiliki kewenangan untuk merilis Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari caleg mantan narapidana korupsi tanpa perlu persetujuan dari partai politik.

Kata Kunci: framing, kandidasi, narapidana korupsi

ABSTRACT

Aura Sukma Aulia: “Framing Media dalam Pemberitaan Caleg Mantan Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 (Studi Kasus di Kompas.com dan Media Indonesia)”

This research aims to find out how the news about former corruption convict. This research aims to analyze media framing regarding legislative candidates who are ex-convicts of corruption in the 2024 elections on kompas.com and Media Indonesia, as well as analyzing the responses given to the news about legislative candidates who are ex-convicts of corruption in the 2024 elections on Kompas.com and Media Indonesia.

The theoretical basis used in analyzing research is the theory put forward by Robert N. Entman regarding framing analysis. The research method used is qualitative with a case study approach. In collecting data, researchers used data collection techniques which were divided into two data, namely primary data sourced from media reports by Kompas.com and Media Indonesia in the news researched by researchers and interviews to confirm the news. Furthermore, secondary data collection techniques are from Election Law No. 7 of 2017 and PKPU No. 10 and 11 of 2023, as well as data from written sources.

Research on media framing in reporting on legislative candidates who are former corruption convicts in the 2024 election according to Robert N. Entman's theory shows that this reporting is seen as a legal and political problem, especially related to the status of former corruption convicts who are running for legislative positions. The diagnosis of the cause of the problem is their status as former corruption convicts who want to be involved in the 2024 elections, which is contrary to PKPU regulations No. 10 and 11 of 2023 and Law No. 7 of 2017 concerning elections. To make moral decisions, emphasis is placed on the need for the KPU to take firm action and comply with binding Supreme Court decisions. The recommendation for handling the problem is that the KPU should have the authority to release the Curriculum Vitae (DRH) of legislative candidates who are former corruption convicts without needing approval from political parties.

Keywords: *framing, candidacy, corruption convicts*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Rencana Sistematika Skripsi	17
BAB II.....	19
PERSPEKTIF TEORITIS DAN.....	19
ARGUMENTASI UTAMA.....	19
1. Framing Media	19
2. Argumentasi Utama.....	26
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN	28
1. Jenis dan Problema Penelitian.....	28
2. Unit dan Peringkat Analisis.....	30
3. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling.....	30
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Teknik Analisis Data	35
6. Teknik Validasi Data	36
BAB IV.....	38
PEMBAHASAN.....	38
1. Framing Media tentang Caleg Mantan Narapidana Korupsi di Pemilu 2024	38
A. Define Problem.....	46
1) Kompas.com	46

2) Media Indonesia.....	51
B. Diagnose Causes.....	56
1) Kompas.com	56
2) Media Indonesia.....	63
C. Make Moral Judgement.....	69
1) Kompas.com	69
2) Media Indonesia.....	74
D. Treatment Recommendation.....	79
1) Kompas.com	79
2) Media Indonesia.....	83
2. Respon yang Ditunjukkan Media Kompas.com dan Media Indonesia dalam Pemberitaan Narapidana Korupsi jadi Caleg di Pemilu 2024	90
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	104
Lampiran 1 Dokumpentasi Wawancara.....	104
Lampiran 2.....	105
Pertanyaan Wawancara.....	105

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Ebook:

- Aji Lukiyana dan Indah Suryawati, "Pembingkai Berita Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019," Tahun 2020.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. 2022. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3 (01): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed Revisi VI (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006) hlm 50.
- Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2013) hal. 66
- Donal Fariz."Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi*, 17, no. 2, (2020): 310. <https://doi.org/10.31078/jk1724>
- Dumitrescu, D dan Mughan, A. 2010. *Mass Media and Democratic Politics*. Springer: New York
- Eriyanto, 2015. *Analisis Jaringan Komunikasi*. Pustaka Media: Jakarta
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of communication*, 43(4), 51-58.
- Hallahan, K. (1999). Seven models of framing: Implications for public relations, *Journal of Public Relations Research*, 11(3), Hal 205-242.
- Hadityo Anugrah Allahi dan Fathur Rahman, "Kandidasi Calon Anggota Legislatif Koruptor: Refleksi atas Pemilu 2019 di Malang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.5, Nomor 1, Tahun 2020*.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2011) hlm 186.
- Mia Arlitawati, "Kewenangan KPU Dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018),” *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018*.
- Muhammad Fairuz Satria Ananda, dkk, “Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal di Media Online Detik.com,” *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol.3, Nomor 2 Juli 2019.
- Mutia Nur Fadhilah Ruslan, dkk. (2021) tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana”
- Pratiwi, D. K., Nurwagita, E. D., & Hamdani, M. S. (2023). Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 1, No. 4, pp. 113-125).
- Pasal 22E ayat (2) UUD 1945
- Riskiyanti, R., & Adiarsa, S. R. (2022). Kontradiksi Hak Asasi Mantan Narapidana Korupsi Dan Pencabutan Hak Oleh Putusan Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15).
- Ruslan, M. N. F., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 782-797.
- Setiowati, S. (2024). *Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo. co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1-15.

T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hal 49.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Hak Warga Negara Indonesia* Pasal 28 D Ayat (3).

UINSA, Tim Penyusun Buku Panduan Skripsi FISIP. PANDUAN SKRIPSI, 2023

Valentina Mariama Sadeadema, S.IP, “Pemilu dan Korupsi (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019),” *Jurnal Transformative*, Vol.5, Nomor 2 September 2019.

Yuri Alfrin Aladdin, “Bagaimana Media Portal Berita Islam Menampilkan Pemberitaan Isu Kembalinya Koruptor ke Panggung Politik.”

Website:

Kompas.com, “Mantan Koruptor Daftar Caleg, Dosen UMM: Pembuat Aturan yang Keliru”,
<https://www.kompas.com/edu/read/2023/05/29/144712671/mantan-koruptor-daftar-caleg-dosen-umm-pembuat-aturan-yang-keliru>, diakses pada 10 April 2024.

Kompas.com, “Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg”
<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/31/06342961/masyarakat-sipil-minta-mk-tegur-kpu-soal-aturan-eks-terpidana-jadi-caleg>, diakses pada 10 April 2024.

Kompas.com, “KPU dan Masyarakat Sipil Beda Tafsir Syarat Eks Terpidana, Celah Bagi Koruptor?”
<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/01/13493861/kpu-dan-masyarakat-sipil-beda-tafsir-syarat-nyaleg-eks-terpidana-celah-bagi>, diakses pada 10 April 2024.

Kompas.com, ” KPK Ingatkan KPU Ikuti Putusan MK soal Syarat Eks Terpidana Boleh Jadi Caleg”,

<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/13450191/kpk-ingatkan-kpu-ikuti-putusan-mk-soal-syarat-eks-terpidana-boleh-jadi-caleg?page=all>, diakses pada 10 April 2024.

Kompas.com, “Bawaslu: Mantan Terpidana Bisa Jadi Caleg setelah 5 Tahun Bebas Murni dari Semua Hukuman”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/12584471/bawaslu-mantan-terpidana-bisa-jadi-caleg-setelah-5-tahun-bebas-murni-dari?page=all>, diakses pada 10 April 2024.

Kompas.com, “Anas Urbaningrum Anggap Zalim Putusan yang Cabut Hak Politiknya”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/15/22112421/anas-urbaningrum-anggap-zalim-putusan-yang-cabut-hak-politiknya>, diakses pada 10 April 2024.

Kompas.com, “Tiga Calegnya Eks Koruptor, Nasdem: Semua Kita Serahkan Pada Rakyat, Terserah Pilih yang Mana”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/27/17263921/tiga-calegnya-eks-koruptor-nasdem-semua-kita-serahkan-pada-rakyat-terserah>, diakses pada 3 Mei 2024.

Kompas.com, “Sikap KPU tak Ungkap Mantan Napi masuk DCS Dipertanyakan”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/19/19532091/sikap-kpu-tak-ungkap-mantan-napi-masuk-dcs-dipertanyakan>, diakses pada 11 April 2024.

Kompas.com, “Ketua KPK: Eks Napi Koruptor yang Jadi Caleg Harus Beri Tahu Rakyat”, https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/21205661/ketua-kpk-eks-napi-koruptor-yang-jadi-caleg-harus-beri-tahu-rakyat-bahwa?page=all#google_vignette, diakses pada 11 April 2024.

Kompas.com, “Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Korupsi Nyaleg”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/30/23223771/respons->

[kpu-soal-putusan-ma-terkait-syarat-eks-terpidana-korupsi-nyaleg](#), diakses pada 13 April 2024.

Kompas.com, “ICW Kritik KPU Ulur Waktu Revisi Aturan yang Dibatalkan MA”,

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/05/12111911/icw-kritik-kpu-ulur-waktu-revisi-aturan-caleg-yang-dibatalkan-ma>,

diakses pada 11 April 2024.

Kompas.com, “Sejumlah Caleg Tutupi Riwayat Hidup, KPU Mengaku Sudah Surati Parpol”,

<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/08221321/sejumlah-caleg-tutupi-riwayat-hidup-kpu-mengaku-sudah-surati-parpol>,

diakses pada 11 April 2024.

Kompas.com, “Data ICW, Ini Daftar 56 Mantan Koruptor yang Calonkan Diri pada Pemilu 2024”,

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/27/090000365/data-icw-ini-daftar-56-mantan-koruptor-yang-calonkan-diri-pada-pemilu-2024>, diakses pada 13 April 2024.

Media Indonesia, “I CW: 56 Mantan Terpidana Korupsi Maju Jadi Caleg di Pemilu 2024”,

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/627424/icw-56-mantan-terpidana-korupsi-maju-jadi-caleg-di-pemilu-2024#google_vignette, diakses pada Februari 2024.

Media Indonesia, “Mantan Terpidana Bebas Sebelum 1-14 Mei 2018 Boleh Daftar jadi Caleg”,

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/578654/mantan-terpidana-bebas-sebelum-1-14-mei-2018-boleh-daftar-jadi-caleg>, diakses pada 10 Maret 2024.

Media Indonesia, “KPK Miris PKPU Baru Bisa Tabrak Aturan Pencabutan Hak Politik Eks Napi Korupsi dari MK”,

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/583899/kpk-miris-pkpu-baru-bisa-tabrak-aturan-pencabutan-hak-politik-eks-napi-korupsi-dari-mk>, diakses pada 10 Maret 2024.

- Media Indonesia, “ICW Catat Ada 3 Masalah Serius di PKPU”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/584888/icw-catat-ada-3-masalah-serius-di-pkpu>, diakses pada 11 Maret 2024.
- Media Indonesia, “Eks Hakim MK tidak Setuju MK Atur Sistem Pemilu”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/586295/eks-hakim-mk-tidak-setuju-mk-atur-sistem-pemilu>, diakses pada 11 Maret 2024.
- Media Indonesia, “KPK Dukung Gugatan Aturan Nyaleg Buat Eks Napi Korupsi”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589265/kpk-dukung-gugatan-aturan-nyaleg-buat-eks-napi-korupsi>, diakses pada 11 Maret 2024.
- Media Indonesia, “ICW Ingatkan Ada Jeda Waktu 5 Tahun bagi Eks Napi Korupsi yang Ingin Nyaleg”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/597119/icw-ingatkan-ada-jeda-waktu-5-tahun-bagi-eks-napi-korupsi-yang-ingin-nyaleg>, diakses pada 11 Maret 2024.
- Media Indonesia, “KPU tak Ungkap Status Mantan Terpidana pada DCS”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/606049/kpu-tak-ungkap-status-mantan-terpidana-pada-dcs>, diakses pada 13 Maret 2024.
- Media Indonesia, “KPK Minta Eks Terpidana Korupsi Taat Aturan”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/609454/kpk-minta-eks-terpidana-korupsi-taat-aturan>, diakses pada 13 Maret 2024.
- Media Indonesia, “MA Anulir Regulasi Pencalegan Eks Terpidana”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/617502/ma-anulir-regulasi-pencalegan-eks-terpidana>, diakses pada 13 Maret 2024.
- Media Indonesia, “KPU Dianggap Sengaja Ulur Waktu”, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/618081/kpu-dianggap-sengaja-ulur-waktu#google_vignette, diakses pada 14 Maret 2024.
- Media Indonesia, “Pemilih Perlu Tahu CV Caleg sebelum Nyoblos”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/626859/pemilih->

- [perlu-tahu-cv-caleg-sebelum-nyoblos#google_vignette](#), diakses pada 14 Maret 2024.
- Media Indonesia, “KPU Segera Surati Partai Politik untuk Buka CV Caleg”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/626929/kpu-segera-surati-partai-politik-untuk-buka-cv-caleg>, diakses pada 14 Maret 2024.
- Media Indonesia, “ICW: 56 Mantan Terpidana Korupsi Maju Jadi Caleg di Pemilu 2024”, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/627424/icw-56-mantan-terpidana-korupsi-maju-jadi-caleg-di-pemilu-2024#google_vignette, diakses pada 2024.
- Media Indonesia, “KPU Dianggap Sengaja Ulur Waktu”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/618081/kpu-dianggap-sengaja-ulur->, di akses pada 10 Mei 2024.
- Media Indonesia, “Pemilih Perlu Tahu CV Caleg sebelum Nyoblos”, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/626859/pemilih-perlu-tahu-cv-caleg-sebelum-nyoblos#google_vignette, diakses pada 10 Mei 2024.
- Media Indonesia, “KPU Segera Surati Partai Politik untuk Buka CV Caleg”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/626929/kpu-segera-surati-partai-politik-untuk-buka-cv-caleg>, diakses pada 10 Mei 2024.
- Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/627424/icw-56-mantan-terpidana-korupsi-maju-jadi-caleg-di-pemilu-2024#google_vignette, diakses pada 10 Mei 2024.